

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental (*state of mind*) dari suatu masyarakat yang telah melalui kombinasi tertentu dari proses sosial, ekonomi, dan lembaga, yang memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Adapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan sebagai berikut: pertama, peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang kebutuhan hidup yang pokok. Kedua, peningkatan standar hidup. Ketiga, perluasan pilihan ekonomi dan sosial (Todaro dan Smith, 2011).

Kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Tidak hanya itu kemiskinan juga merupakan suatu permasalahan yang disebabkan oleh keadaan nasional suatu negara dan situasi global. Badan Pusat Statistik (BPS), mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau layak bagi kehidupannya.

Kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya produktivitas yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya kenaikan pendapatan dalam suatu provinsi. Adanya peningkatan pendapatan tersebut akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga terjadi peningkatan konsumsi barang

dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi barang dan jasa, maka dibutuhkan peningkatan produksi seiring dengan kenaikan konsumsi yang terjadi (Samuelson dan Nordhaus, 2004).

Faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya produktivitas suatu negara dapat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang dimiliki, sumber daya manusia, kapital, serta teknologi. Tentunya tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dapat diolah. Akan tetapi semua negara mempunyai sumber daya manusia yang dapat dikembangkan. Meningkatnya sumber daya manusia yang ada dalam suatu negara atau wilayah baik secara kuantitas maupun kualitas, secara tidak langsung akan menunjukkan bahwa jumlah orang yang terserap untuk bekerja meningkat sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran. Tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sejalan dengan terjadinya penurunan jumlah pengangguran.

Pada bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui delapan *Millenium Development Goal* (MDG) sebagai komitmen untuk meniadakan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan manusia lainnya pada tahun 2015. Seluruh negara sangat menyadari sifat multidimensi dari pembangunan dan penanggulangan kemiskinan; mengakhiri kemiskinan memerlukan lebih dari sekedar peningkatan pendapatan orang-orang miskin. Adapun tujuan pembangunan Milenium 2015 sebagai berikut: (Todaro dan Smith, 2011).

1. Mengurangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem.
2. Mencapai pendidikan dasar universal.

3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Mengurangi tingkat mortalitas anak-anak.
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/ AIDS, malaria, dan penyakit lainnya.
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
8. Membina kerja sama global bagi pembangunan.

Tingkat kemiskinan merupakan masalah besar di banyak negara-negara berkembang tidak terkecuali negara Indonesia. Dikatakan besar jika masalah ini berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius. Suatu pemerintah bisa jatuh karena amukan rakyat miskin yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinannya (Tambunan, 2015).

Mendapatkan hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara *universal*. Sesuai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Salah satu sarana dalam pembangunan nasional yaitu dengan cara menurunkan jumlah penduduk miskin karena kemiskinan dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi (Sari, 2012).

Berdasarkan berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia (Perkotaan dan Perdesaan) pada bulan Maret tahun

2014 sebesar 28,28 juta orang. Akan tetapi pada bulan Maret di tahun 2015 mengalami kenaikan sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28,59 juta orang. Beberapa faktor yang terkait dengan peningkatan jumlah penduduk miskin selama tahun 2014 – 2015 antara lain selama periode September 2014 – Maret 2015 terjadi inflasi sebesar 4,03 persen, secara nasional rata-rata harga beras mengalami peningkatan sebesar 14,48 persen yaitu dari Rp 11.433,00 per kg pada September 2014 menjadi Rp 13.089,00 per kg pada Maret 2015(BPS, 2015).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau di Indonesia
(Juta Orang)

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan
Sumatera	6,37
Jawa	15,45
Bali dan Nusa Tenggara	2,18
Kalimantan	0,98
Sulawesi	2,12
Maluku dan Papua	1,49

Sumber : Badan Pusat Statistik,(2015)

Jika dilihat pada Tabel 1.1 jumlah penduduk miskin menurut Pulau terbanyak berada di Pulau Jawa sebesar 15,45 juta orang, sedangkan yang terendah Pulau Kalimantan dengan jumlah 0,98 juta orang penduduk miskin Perdesaan dan Perkotaan. Terendah kedua terdapat di Pulau Maluku dan Papua dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1,49 juta orang.

Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kemiskinan di Indonesia. Di antaranya adalah PDRB per kapita, pengangguran, dan inflasi. Menurut Barika (2013) pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil pertumbuhan keseluruhan sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Lambatnya pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan lapangan pekerjaan dapat menyebabkan terjadinya masalah pengangguran yang ada di suatu wilayah. Meningkatnya pengangguran, tingginya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Inflasi merupakan indikator yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Terjadinya inflasi akan menyebabkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu akibat penting dari inflasi adalah cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat (Riyani, 2014).

Pengangguran yang terjadi dapat disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, akan tetapi bertambahnya angkatan kerja tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Dalam hal ini semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Gambar 1.1, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang ada di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, yaitu sebesar 11.24% pada tahun 2005 menjadi 7.14% pada tahun 2010. Akan tetapi pada tahun 2011 sedikit mengalami kenaikan sebesar 0.34% sehingga menjadi 7.48%. Pada tahun 2012 mengalami penurunan kembali menjadi 6.13% dan pada

tahun 2013 sedikit mengalami kenaikan kembali menjadi 6.17%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya berakibat makin meningkatnya jumlah angkatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah orang mencari pekerjaan akan semakin meningkat, sejalan dengan hal tersebut jumlah tenaga kerja juga akan bertambah. Permasalahan ini perlu penanganan yang serius sehingga akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.



Sumber : Badan Pusat Statistik,(2013)

Gambar 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia (%) Tahun 2005-2013

Menurut Sukirno (2002), salah satu faktor penting yang menentukan kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat akan mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan

menimbulkan efek yang buruk juga kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek ekonomi dalam jangka panjang.

Meningkatnya daya beli yang diimbangi dengan peningkatan produksi akan menciptakan keadaan dimana setiap kebutuhan konsumsi dapat terpenuhi. Keadaan tersebut akan berbanding terbalik jika peningkatan konsumsi tidak sejalan dengan pemenuhan barang dan jasa. Keadaan seperti ini produksi tidak mengalami peningkatan dan akan mengakibatkan barang dan jasa tidak mampu mencukupi permintaan sehingga memicu terjadinya kenaikan semua harga barang dan jasa atau dapat disebut dengan inflasi.

Dengan adanya inflasi maka daya beli riil masyarakat akan menurun. Hal ini secara tidak langsung akan berakibat masyarakat mengurangi jumlah konsumsi. Jika inflasi terus terjadi, maka pemenuhan barang dan jasa akan menurun. Masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan akan mengakibatkan jumlah masyarakat miskin akan semakin bertambah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, pengangguran, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan setiap provinsi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2009-2013 ?
2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2009-2013 ?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2009-2013 ?
4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, pengangguran, dan inflasi secara bersama-sama terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2009-2013 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2009-2013.
- 2) Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2009-2013.
- 3) Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh inflasi terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2009-2013.

- 4) Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, pengangguran, dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2009-2013.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah sebagai bahan informasi tambahan terkait kemiskinan sehingga dapat membuat kebijakan atau program untuk mengatasi kemiskinan setiap provinsi di Indonesia.
- 2) Dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan kemiskinan di Indonesia ataupun di daerah lain.
- 3) Bagi peneliti dapat memberikan wawasan tambahan tentang studi kemiskinan dan dapat menambah pengalaman di bidang penelitian.

1.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia.
- 2) Pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia.

- 3) Infasi berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia.
- 4) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, pengangguran, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori dan studi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, model yang digunakan dalam penelitian, dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian, dan batasan operasional.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil analisis data yang diperoleh dari perhitungan dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pemerintah.

